

# Strategi Pengembangan Daerah Berbasis Smart Governance: Analisis Kesiapan dan Analisis Gap di Kabupaten Kolaka Timur

**Riyan Abdillah Takdir<sup>1\*</sup>, Adris A. Putra<sup>2</sup>, Muammar Makmur<sup>3</sup>, Erich Nov Putra Razak<sup>4</sup>, Abdi Juryan Ladianto<sup>5</sup>, Asa Hari Wibowo<sup>6</sup>, Muzammil Makmur<sup>7</sup>, Anggun Maharani<sup>8</sup>.**

Teknik Kelautan UHO<sup>1</sup>, Teknik Sipil UHO<sup>2,3,4</sup>, Teknik Arsitektur UHO<sup>5</sup>, Teknik Informatika UHO<sup>6</sup>, Teknik Sipil UNSULTRA<sup>7</sup>, Teknik Sipil UNIPA<sup>8</sup>.

Koresponden\*, Email: [riyanabdillah95@uho.ac.id](mailto:riyanabdillah95@uho.ac.id)

Info Artikel	Abstract
Diajukan Diperbaiki Disetujui	<p><i>The development of information and communication technology has driven the transformation of public governance through the concept of smart governance as a key pillar of smart city. This study aims to analyze the level of readiness and implementation gaps of smart governance in East Kolaka Regency as a basis for formulating regional development strategies. A descriptive-evaluative approach using mixed methods was employed, based on secondary data from policy documents, institutional reports, and regional statistical data. The analysis focused on technological infrastructure, human resources, and policy and institutional frameworks. The results indicate that East Kolaka Regency has achieved an initial level of readiness in implementing smart governance; however, significant gaps remain in human resource quality, policy consistency, and inter-institutional and stakeholder synergy. The proposed development strategies emphasize institutional strengthening, continuous human resource capacity building, consistent policy formulation, and enhanced cross-sector collaboration. This study provides empirical contributions to the discourse on smart governance implementation in non-metropolitan regions.</i></p>
Kata kunci: smart governance, smart city, analisis gap, Kabupaten Kolaka Timur	<p><b>Abstrak</b>            Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui konsep smart governance sebagai pilar utama smart city. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan dan kesenjangan implementasi smart governance di Kabupaten Kolaka Timur sebagai dasar perumusan strategi pengembangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dengan metode mixed methods berbasis data sekunder, meliputi dokumen kebijakan, laporan instansi, dan data statistik daerah. Analisis dilakukan terhadap aspek infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kebijakan dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki kesiapan awal dalam penerapan smart governance, namun masih terdapat kesenjangan pada kualitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Strategi pengembangan yang dirumuskan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penataan kebijakan yang konsisten, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan smart governance pada wilayah non-metropolitan.</p>

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Salah satu dampaknya yang paling nyata adalah transformasi tata kelola pemerintahan melalui konsep smart governance, yang merupakan salah satu pilar utama dari smart city. Smart governance mengacu pada pengelolaan pemerintahan secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan [1].

Dalam konteks Kabupaten Kolaka Timur, implementasi smart governance menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Kolaka Timur memerlukan sistem tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik [2].

Namun, implementasi smart governance di Kabupaten Kolaka Timur tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, serta kompleksitas proses birokrasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi [3]. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi smart governance.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan Kabupaten Kolaka Timur dalam mengadopsi konsep smart governance sebagai bagian dari upaya menuju smart city. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi yang mendukung transformasi digital. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti implementasi smart governance dan smart city pada wilayah perkotaan atau kota besar, kajian mengenai kesiapan dan kesenjangan penerapan smart governance pada tingkat kabupaten, khususnya daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam, masih relatif terbatas. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif tingkat kesiapan dan kesenjangan implementasi smart governance di Kabupaten Kolaka Timur melalui evaluasi infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta kerangka kebijakan dan kelembagaan yang ada. Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyediaan bukti empiris berbasis konteks daerah non-metropolitan, sekaligus perumusan strategi pengembangan smart governance yang aplikatif dan kontekstual sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

## II. METODE

Kabupaten Kolaka Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya transformasi menuju Smart Governance, yang merupakan bagian integral dari konsep Smart City. Transformasi ini didukung oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan infrastruktur teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan regulasi dan kebijakan publik. Namun, untuk mencapai visi tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap kesiapan daerah dalam mengadopsi teknologi digital secara efektif.

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dengan memadukan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting kesiapan implementasi smart governance di Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan indikator infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Sementara itu, pendekatan evaluatif diterapkan untuk menilai kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam penerapan smart governance. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta data statistik daerah, yang kemudian dianalisis secara komparatif untuk menghasilkan rekomendasi strategis pengembangan smart governance yang kontekstual dan aplikatif.

### 2.2. Suprastruktur

Suprastruktur menjadi salah satu elemen utama dalam mewujudkan Smart Governance. Kabupaten Kolaka Timur telah membangun berbagai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fondasi untuk mendukung layanan publik berbasis digital. Beberapa indikator kunci yang digunakan untuk menilai ketersediaan suprastruktur meliputi:

- Ketersediaan server lokal: Server lokal memainkan peran penting dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi layanan publik. Saat ini, Kabupaten Kolaka Timur telah membangun pusat data lokal untuk mendukung operasional sistem pemerintahan elektronik. Pusat data ini dirancang untuk memastikan keamanan dan keandalan data, serta memfasilitasi integrasi antarinstansi pemerintah.
- Akses internet di satuan kerja: Akses internet yang merata di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan konektivitas yang stabil di seluruh instansi pemerintah [4]. Meskipun demikian, masih ada beberapa wilayah terpencil yang mengalami kendala akses internet, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan jaringan.

- Sistem informasi eksisting: Total layanan online yang tersedia mencapai 42 aplikasi untuk kategori e-Publik, 5 aplikasi untuk e-Kesehatan, dan beberapa aplikasi lainnya untuk kategori e-Logistik dan e-Pengadaan [5]. Namun, sebagian besar aplikasi ini masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menghambat interoperabilitas antarinstansi.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan distribusi jumlah aplikasi berbasis layanan publik di Kabupaten Kolaka Timur:

**Tabel 1.** Distribusi Jumlah Aplikasi Layanan Publik di Kabupaten Kolaka Timur

KATEGORI	JUMLAH APLIKASI
E-PUBLIK	42
E-KESEHATAN	5
E-LOGISTIK	2
E-PENGADAAN	1

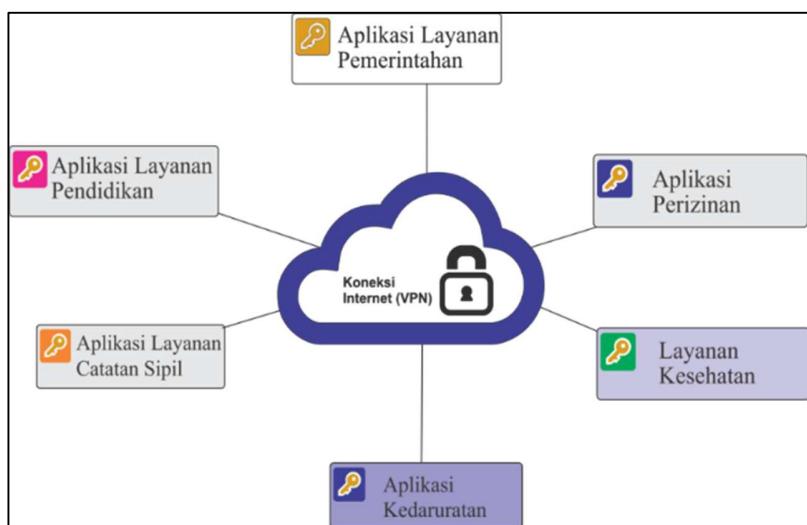
Sumber: Diskominfo Kabupaten Kolaka Timur, 2022.

### 2.3. Infrastruktur Dasar

Selain suprastruktur, infrastruktur dasar juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kesiapan daerah. Infrastruktur dasar mencakup aspek fisik dan non-fisik yang mendukung implementasi teknologi digital. Beberapa indikator yang dievaluasi meliputi:

- Pusat operasi (Operation Room): Kabupaten Kolaka Timur telah membangun ruang operasi untuk memantau pelaksanaan program Smart City secara real-time. Ruang ini dilengkapi dengan dashboard interaktif yang menampilkan data terkait layanan publik, ekonomi, dan lingkungan [6].
- Jaringan internet publik: Pemerintah daerah juga menyediakan layanan jaringan WiFi gratis di titik-titik strategis, seperti alun-alun, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan digital [7].

Berikut adalah gambar ilustrasi yang menunjukkan integrasi infrastruktur TIK dalam sistem layanan publik Kabupaten Kolaka Timur:



**Gambar 1.** Koneksi Beberapa Aplikasi Layanan Pemerintah (e-government)

### 2.4. Aparat Pemerintahan

Pegawai pemerintah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara sebagai abdi masyarakat atau pelayan publik. Sedangkan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas. Untuk meningkatkan kualitas aparat pemerintahan, berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan telah diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program ini mencakup peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta pengembangan karakter yang menekankan pada nilai-nilai etika, integritas, dan profesionalisme. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong efisiensi dan transparansi layanan publik. Dengan adanya sistem digitalisasi, seperti e-government, aparatur negara dapat

memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan teknologi bagi aparatur pemerintahan menjadi kunci penting untuk menciptakan birokrasi yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat [8].

**Tabel 2.** Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur Desember 2023

Jabatan / Occupation	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total
Sekolah Dasar (Sd)	—	—	—
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	—	3
Sekolah Menengah Atas (SMA)	109	42	151
Diploma I/Akta I	—	5	5
Diploma II/Akta II	18	28	46
Diploma III/Akta III	64	182	246
Diploma IV/Akta IV	14	33	47
S1/Sarjana/Undergraduate/Bachelor	828	805	1633
S2/Pasca Sarjana/Graduate	113	46	159
S3/Doktor/Ph.D/Post Graduate	3	1	4
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.152</b>	<b>1.142</b>	<b>2.294</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kolaka Timur, 2023

Berdasarkan data BPS Kolaka Timur tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kabupaten Kolaka Timur lebih dominan telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan lulusan Sarjana (S1) yaitu 1.633 orang. Jumlah terbanyak kedua diikuti oleh lulusan Diploma III yaitu 246 orang.

## 2.5. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM yang kompeten dalam bidang TIK menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Smart Governance. Meskipun Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah, masih terdapat kesenjangan dalam hal literasi teknologi. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Pelatihan teknologi digital: Pelatihan kepada aparatur pemerintah tentang penggunaan teknologi digital dalam layanan publik.
- Peningkatan partisipasi masyarakat: Program edukasi digital juga diperluas kepada masyarakat umum.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil evaluasi literasi teknologi di Kabupaten Kolaka Timur:

**Tabel 3.** Evaluasi Literasi Teknologi di Kabupaten Kolaka Timur

INDIKATOR	PERSENTASE (%)
Aparatur Pemerintah Terlatih	65%
Masyarakat Melek Teknologi	40%
Penggunaan Aplikasi Online	50%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kolaka Timur, 2022

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Analisis Gap

Analisis GAP merupakan salah satu pendekatan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi celah antara kondisi saat ini dan tujuan ideal dalam pengembangan suatu sistem, termasuk konsep Smart City. Konsep ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Analisis GAP menjadi langkah penting dalam perencanaan strategis karena memungkinkan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat [9].

Proses mengisi GAP ini penting karena melibatkan identifikasi komponen-komponen kunci dari konsep Smart City yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Setelah identifikasi GAP selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang program-program yang sesuai untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Namun, implementasi saja tidak cukup tanpa adanya evaluasi berkelanjutan untuk

memastikan bahwa inisiatif-inisiatif yang dilakukan benar-benar efektif. Evaluasi berbasis data merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan Smart City karena memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbaikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengetahui perbedaan tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan mencapai visi Kabupaten yang cerdas sesuai dengan arahan pemerintah serta pengembangan konsep Smart City. Inisiatif tersebut dapat berupa program-program pembangunan infrastruktur teknologi, kebijakan publik yang mendukung, atau pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal teknologi dan pengetahuan.

Analisis GAP yang didasarkan pada dimensi-dimensi Smart Governance menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan ketika konsep Smart Governance terwujud di masa depan. Kesenjangan yang menjadi acuan dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.** Indikator dan Gap dalam Implementasi Smart Governance di Kabupaten Kolaka Timur

NO	INDIKATOR	GAP/HAMBATAN
1	Tahap awal penerapan konsep Smart Governance	Tahapan implementasi yang masih awal menghambat penerapan konsep Smart Governance secara menyeluruh.
2	Penyesuaian kebijakan	Kebijakan yang belum stabil dan konsisten dalam penerapannya dapat menghambat pencapaian tujuan Smart Governance.
3	Ketersediaan sumber daya manusia dan capaian kinerja	Ketersediaan SDM yang terbatas dan capaian kinerja yang kurang optimal menghambat efektivitas implementasi Smart Governance.
4	Sinergitas antar lembaga pemerintah maupun swasta	Kurangnya sinergi antar lembaga terkait dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan pengembangan pelayanan publik.

Sumber: Hasil analisis, 2025

Hambatan-hambatan yang tercantum dalam tabel tersebut menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Kolaka Timur dalam mewujudkan konsep Smart Governance. Tahapan implementasi yang masih berada di tahap awal, kebijakan yang belum stabil, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sinergitas antar lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan yang efektif. Semua elemen ini memerlukan perhatian lebih agar Kabupaten Kolaka Timur dapat mempercepat proses transisi menuju pemerintahan yang lebih cerdas dan efisien. Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan pembangunan daerah dapat meningkatkan efektivitas upaya peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, langkah-langkah strategis seperti mempercepat tahapan penerapan konsep Smart Governance, stabilisasi dan konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergitas antar lembaga pemerintah dan swasta akan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi smart governance di Kabupaten Kolaka Timur tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah aparatur, tetapi lebih pada aspek kualitas dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan transformasi digital. Pola rekrutmen ASN yang masih bersifat umum dan belum secara spesifik menargetkan keahlian di bidang teknologi informasi dan manajemen data menyebabkan ketersediaan tenaga teknis digital masih terbatas. Selain itu, program pelatihan yang telah dilakukan cenderung bersifat sporadis dan belum berkelanjutan, sehingga peningkatan kapasitas aparatur belum merata dan belum sepenuhnya mampu mendukung pengelolaan sistem digital secara optimal.

### 3.2. Strategi Pengembangan

Smart Governance memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung kemajuan Smart City di Kabupaten Kolaka Timur. Untuk mencapainya, tahapan inisiasi yang tepat sangat dibutuhkan, meliputi penyusunan struktur pemerintahan yang efisien, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta pengembangan suprastruktur yang berbasis teknologi informasi. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terencana agar setiap komponen dari Smart Governance dapat terintegrasi dengan baik. Sebagai contoh, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan data serta analisis yang efektif dalam pengambilan keputusan. Kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam implementasi Smart City yang berhasil. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital yang memadai juga menjadi syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat [10].

Langkah inisiasi dalam mewujudkan Smart Governance di Kabupaten Kolaka Timur juga mencakup penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi serta inovasi. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek regulasi yang adaptif

terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Seiring dengan hal tersebut, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat dan efisien. Kolaborasi antara berbagai sektor merupakan elemen penting dalam mewujudkan Smart City yang berkelanjutan, karena dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan perkembangan teknologi secara lebih optimal [11]. Oleh karena itu, Kabupaten Kolaka Timur perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan Smart Governance untuk mencapai visi Smart City yang lebih baik di masa depan.

**Tabel 5.** Kondisi Ideal dan Strategi Pengembangan Smart Governance di Kabupaten Kolaka Timur

NO	INDIKATOR	KONDISI IDEAL	STRATEGI PENGEMBANGAN
1	Pembentukan Organisasi Smart City	Tersedianya struktur organisasi yang kuat dan terkoordinasi dengan baik untuk pengelolaan dan pengawasan proyek Smart City.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Dewan Smart City yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali jalannya proyek.</li> <li>Membentuk tim pelaksana yang jelas peran dan tanggung jawabnya agar dapat mengimplementasikan program dengan efektif.</li> <li>Menyusun struktur organisasi dengan peran yang jelas untuk setiap anggota, memperkuat koordinasi antar bagian.</li> </ul>
2	Pengembangan Kebijakan, Prosedur, dan Standar Pengembangan Smart City	Adanya kebijakan yang solid, prosedur yang terstruktur, dan standar operasional yang dapat diterapkan dalam setiap tahap pengembangan Smart City.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan kebijakan jangka panjang yang mendukung pengembangan Smart City yang berkelanjutan.</li> <li>Menyusun prosedur dan standar operasional yang jelas dan mudah diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait.</li> <li>Menjamin kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipantau dan diawasi secara efektif untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan tepat sasaran.</li> </ul>
3	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya tenaga profesional yang kompeten dan terlatih dalam bidang Smart City untuk mengelola dan mengembangkan teknologi serta inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.</li> <li>Mendorong partisipasi dalam seminar, workshop, dan konferensi yang berhubungan dengan inovasi dan teknologi Smart City.</li> <li>Menyediakan akses ke sumber daya untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan dalam teknologi Smart City.</li> </ul>
4	Penguatan Keterlibatan Stakeholder Smart City	Terciptanya kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam pembangunan Smart City.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan forum diskusi rutin dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah untuk mendengarkan masukan serta aspirasi mereka.</li> <li>Membentuk kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademisi untuk mendukung inovasi dalam pengembangan Smart City.</li> <li>Menyusun mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proyek Smart City.</li> </ul>

Sumber: Hasil analisis, 2025

Langkah-langkah strategis yang telah diuraikan di atas menunjukkan pentingnya persiapan yang matang dalam mewujudkan Smart Governance di Kabupaten Kolaka Timur. Pembentukan organisasi yang solid, pengembangan kebijakan dan prosedur yang terstruktur, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan keterlibatan stakeholder adalah kunci utama untuk memastikan proyek Smart City berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Masing-masing langkah tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam implementasi Smart Governance. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pengembangan Smart City, yang perlu didorong sejak tahap perencanaan hingga implementasi [12]. Dengan demikian, keberhasilan Smart Governance di Kabupaten Kolaka Timur tidak hanya bergantung pada kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada keterlibatan aktif semua pihak terkait. Strategi yang dirumuskan merupakan respons langsung terhadap kesenjangan yang teridentifikasi pada tahap analisis gap, khususnya pada aspek kelembagaan, SDM, dan kolaborasi stakeholder.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kolaka Timur telah memiliki kesiapan awal dalam mengimplementasikan smart governance, yang ditunjukkan melalui ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan layanan publik berbasis digital, serta komitmen kebijakan menuju transformasi pemerintahan yang lebih modern. Namun demikian, implementasi smart governance tersebut masih berada pada tahap awal dan menghadapi sejumlah kesenjangan, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta integrasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Keterbatasan SDM lebih disebabkan oleh belum optimalnya kesesuaian kompetensi digital, pola pelatihan yang belum berkelanjutan, serta dinamika rotasi aparatur yang memengaruhi kesinambungan keahlian teknis, sementara lemahnya sinergi antar lembaga dipengaruhi oleh ego sektoral dan belum kuatnya kerangka regulasi lintas sektor.

Berdasarkan hasil analisis gap tersebut, strategi pengembangan smart governance di Kabupaten Kolaka Timur perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan smart city, perumusan kebijakan dan standar operasional yang konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi ini disusun sebagai respons langsung terhadap kesenjangan yang teridentifikasi dan diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada kajian smart governance di wilayah non-metropolitan dan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan transformasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan.

#### REFERENCES

- [1] Citiasia Inc., *Konsep dan Indikator Smart Economy*. Jakarta: Citiasia Inc., 2023.
- [2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Laporan Kesiapan Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Regional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
- [3] A. Hasanuddin and B. Prasetyo, "Implementasi Sistem OSS dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Perizinan di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 3, pp. 89–102, 2020.
- [4] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Timur, *Laporan Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital*. Kolaka Timur: Diskominfo Kabupaten Kolaka Timur, 2022.
- [5] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Kominfo RI, 2017.
- [6] M. Hasanudin, "Evaluasi Berbasis Data dalam Implementasi Smart City: Studi Kasus Kota Bandung," *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, vol. 15, no. 1, pp. 45–60, 2022.
- [7] D. Rahmawati and E. Suharto, "Pendekatan Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berbasis Smart City," *Jurnal Pembangunan Daerah*, vol. 7, no. 2, pp. 56–70, 2021.
- [8] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Laporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara melalui Pendidikan dan Teknologi*. Jakarta: Kementerian PANRB, 2021.
- [9] R. Sari and A. Nugroho, "Strategi Pengembangan Smart City melalui Pendekatan Analisis GAP," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 4, pp. 123–135, 2019.
- [10] D. Sari and R. Prabowo, "Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Smart City di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, vol. 8, no. 2, pp. 125–132, 2020.
- [11] I. Susanti and D. Hidayat, "Peran Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Smart City," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 45–53, 2019.
- [12] D. Pratama and R. Aulia, "Peran Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Smart City di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, vol. 5, no. 2, pp. 85–93, 2018.